



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TA. 2023



BAWASLU KOTA SURABAYA (686508)

surabaya.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, 30 Juni 2023
Pit. Kepala Sekretariat



Arief Proyono, S.E
NIP. 19820614 201503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWAB	iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
2. NERACA	4
3. LAPORAN OPERASIONAL	5
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN ..	21
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	33
D. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL	44
E. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	49
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	51
6. LAMPIRAN	55



PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Surabaya, 30 Juni 2023

Plt. Kepala Sekretariat



Ari Priyono, S.E

NIP. 19820614 201503 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023. Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 10.367.695.204,00 atau mencapai **60%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp 17.397.737.000,00**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar **Rp 1.335.685.136,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 1.244.929.412,00**. Aset Tetap sebesar **Rp. 90.755.724,00**. Aset Lainnya sebesar **Rp. 0,00**. Nilai Kewajiban sebesar **Rp. 1.345.732.724,00** dan nilai Ekuitas sebesar **Rp. (10.047.588,00)**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp 0,00**, sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar **Rp 10.413.982.394,00** sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp 10.413.982.394,00)**. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp 0** dan **Rp 0** sehingga Entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar **(10.413.982.394,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar **Rp 5.153.000,00** ditambah Surplus/(Defisit)-LO sebesar **(Rp 10.413.982.394)** dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai **Rp 0,00** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp 10.398.781.206** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai **Rp (10.047.588,00)**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis aktual.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

URAIAN	CATATAN	30-Juni-2023		% thd Anggaran	30-Juni 2022		% thd Anggaran
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
BELANJA	B.1						
Belanja Pegawai	B.2	1.283.006.000	767.516.951	60	736.782.000	360.323.300	49
Belanja Barang	B.3	15.719.181.000	9.533.450.253	61	1.176.374.000	297.851.697	25
Belanja Modal	B.4	395.550.000	66.728.000	17	6.100.000	-	-
JUMLAH BELANJA		17.397.737.000	10.367.695.204	60	1.919.256.000	658.174.997	34

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

2. NERACA

NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	CATATAN	30-Juni-2023	31-Des-2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2	30.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1.214.929.412	0
JUMLAH ASET LANCAR		1.244.929.412	0
ASET TETAP	C.4		
Peralatan dan Mesin	C.5	270.803.787	169.150.507
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.6	(180.048.063)	(163.996.907)
JUMLAH ASET TETAP		90.755.724	5.153.600
ASET LAINNYA	C.7		
Aset Lain-lain	C.8	4.559.000	4.559.000
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.9	(4.559.000)	(4.559.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		1.335.685.136	5.153.600
KEWAJIBAN			
KEWAJIAN JANGKA PENDEK	C.10		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.11	1.315.732.724	0
Uang Muka dari KPPN	C.12	30.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.345.732.724	0
JUMLAH KEWAJIBAN		1.345.732.724	0
EKUITAS			
EKUITAS	C.13	(10.047.588)	5.153.600
JUMLAH EKUITAS		(10.047.588)	5.153.600
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.335.685.136	5.153.600

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

3. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

URAIAN	CATATAN	30-Juni-2023	30-Juni-2022
KEGIATAN OPERASIONAL		-	-
PENDAPATAN OPERASIONAL		-	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN		-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		-	-
PENDAPATAN HIBAH		-	-
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.1	847.320.263	440.733.900
Beban Barang dan Jasa	D.2	6.703.945.553	292.492.382
Beban Pemeliharaan	D.3	250.420.700	13.825.295
Beban Perjalanan Dinas	D.4	2.600.084.000	32.534.020
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.5	12.211.878	-
JUMLAH BEBAN		10.413.982.394	779.585.597
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10.413.982.394)	(779.585.597)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(10.413.982.394)	(779.585.597)
POS LUAR BIASA	D.6	-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		(10.413.982.394)	(779.585.597)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

URAIAN	CATATAN	30-Jun2022	30-Jun-2022
EKUITAS AWAL	E.1	5.153.000	-
SURPLUS /DEFISIT – LO	E.2	(10.413.982.394)	779.585.597
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	10.398.781.206	685.174.997
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(15.201.188)	(121.410.600)
EKUITAS AKHIR	E.4	(10.047.588)	(121.410.600)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM DAN PROFIL SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Tugas dan Wewenang Bawaslu Kota adalah:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Profil Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya adalah Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota yang diklasifikasikan pada Tipe/Kelas B. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya membawahi 3 (Tiga), dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Kepala Subbagian Administrasi;
- 2. Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat;
- 3. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum;

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. BASIS AKUNTANSI

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya dalam penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah

timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer.	4
<i>Franchise.</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-Lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 2 (Dua) kali dari DIPA awal, dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Revisi ke-1 sesuai surat Bawaslu Republik Indonesia nomor 586/PR.03.01/K1/12/2022 hal Usulan Revisi Anggaran *Automatic Adjustment* Belanja Bawaslu TA 2023 dan telah disahkan dengan *Digital Stamp 9118-8485-1544-0700* Revisi ke-1 tanggal 23 November 2023;
2. DIPA Revisi ke- 2 sesuai surat Bawaslu Kota Surabaya nomor 150/KU.00/JI-24/4/2023 perihal Usulan Revisi Anggaran dan telah disahkan dengan *Digital Stamp 5842-1708-8419-3528* Revisi ke 02 tanggal 03 Juli 2023.

Perubahan tersebut berdasarkan kebutuhan belanja, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Pagu Anggaran

URAIAN	Per 30 Juni 2023	
	ANGGARAN	
	SEBELUM REVISI	SETELAH REVISI
Pendapatan dan Hibah		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1.283.006.000	1.283.006.000
Belanja Barang	15.719.181.000	15.719.181.000
Belanja Modal	395.550.000	395.550.000
Jumlah Belanja	17.397.737.000	17.397.737.000

B.1. Belanja

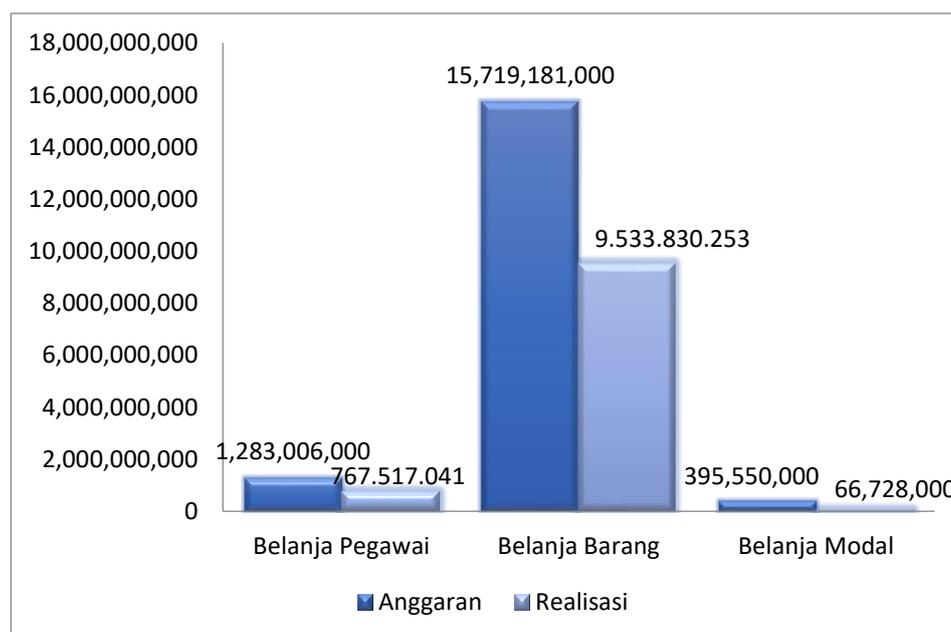
Realisasi Belanja pada periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp 10.367.695.204,00** atau **60%** dari anggaran belanja sebesar **Rp 17.397.737.000**. Rincian anggaran dan

realisasi belanja periode sampai dengan 30 Juni 2023 sebagaimana berikut ini:

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode s.d. 30 Juni 2023

NO	Rincian	Anggaran	Realisasi	%Real Angg.
1	Belanja Pegawai	1.283.006.000	767.517.041	60
2	Belanja Barang	15.719.181.000	9.533.830.253	61
3	Belanja Modal	395.550.000	66.728.000	17
JUMLAH BELANJA		17.397.737.000	10.368.075.294	60
Pengembalian Belanja		-	380.090	-
JUMLAH		17.397.737.000	10.367.695.204	60

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023



Rekapitulasi belanja negara sebesar **Rp. 10.367.695.204,00** merupakan pengurangan dari realisasi Belanja Kotor **Rp. 10.368.075.294** dikurangi Pengembalian Belanja **Rp.380.090,00**.

Berikut perbandingan realisasi anggaran antara 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022:

**Tabel 6. Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 203 dan 30 Juni 2022**

NO	Uraian	30 Juni 2023	30 Juni 2022	Naik (Turun) %
1	Belanja Pegawai	767.517.041	360.323.000	113
2	Belanja Barang	9.533.830.253	297.851.697	3.107,59
3	Belanja Modal	66.728.000	0	-
Jumlah Belanja Kotor		10.368.075.294	658.174.997	1.475,27
Pengembalian Belanja		380.090	-	-
Jumlah		10.367.695.204	658.174.997	1.475,27

B.2. Belanja Pegawai

Pada periode 30 Juni 2023 realisasi belanja pegawai sebesar **Rp 767.516.951** atau **60%** dari anggaran sebesar **Rp 1.283.006.000,00**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Tabel 7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Periode s.d. 30 Juni 2023**

NO	Rincian	Anggaran	Realisasi	%Real Angg.
1	Belanja Pegawai	1.283.006.000	767.517.041	60
JUMLAH BELANJA KOTOR		1.283.006.000	767.517.041	60
Pengembalian Belanja		-	90	-
JUMLAH		1.283.006.000	767.516.951	60

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode 30 Juni dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar **Rp 767.516.951,00** dan **Rp 360.323.300**. Rekapitulasi belanja pegawai sebesar **Rp 767.516.951,00** merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Kotor sebesar **Rp 767.517.041** dikurangi Pengembalian Belanja Pegawai sebesar **Rp 90,00**. Berikut

perbandingan realisasi belanja pegawai antara 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022:

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

NO	Uraian	30-Juni-2023	30-Juni-2022	Naik (Turun) %
1	Belanja Gaji Pokok PNS	161.301.528	-	-
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.575	-	-
3.	Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	12.183.038	-	-
4	Belanja Tunj. Anak PNS	3.868.100	-	-
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	11.760.000	-	-
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.587.200	-	-
7	Belanja Uang Makan PNS	26.159.000	4.440.000	489,16
8	Belanja Tunjangan Umum PNS	5.920.000	-	-
9	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	418.985.700	355.883.300	17,73
10	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	115.749.900	-	-
Jumlah Belanja Kotor		767.517.041	360.323.300	113
Pengembalian Belanja Pegawai		90	-	-
Jumlah Belanja Pegawai		767.516.951	360.323.300	113

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2023 sebesar **Rp. 767.516.951,00** seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang digunakan untuk:

1. Pembayaran gaji pokok PNS bulan Januari sampai Juni serta gaji THR dan gaji ke 13;
2. Pembayaran pembulatan gaji pokok PNS bulan Januari sampai Juni serta gaji THR dan gaji ke 13;
3. Pembayaran Tunjangan Suami/Istri PNS bulan Januari sampai Juni serta gaji THR dan gaji ke 13;

4. Pembayaran Tunjangan Anak PNS bulan Januari sampai Juni 2023 serta gaji THR dan gaji ke 13
5. Pembayaran tunjangan struktural bulan Januari sampai Juni serta gaji THR dan gaji ke 13;
6. Pembayaran Tunjangan Beras PNS;
7. Pembayaran uang makan PNS bulan Januari sampai Juni serta gaji THR dan gaji ke 13;
8. Pembayaran tunjangan umum PNS bulan Januari sampai Juni serta gaji THR dan gaji ke 13;
9. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya bulan Januari sampai Juni serta gaji THR dan gaji ke 13;
10. Pembayaran tunjangan kinerja PNS bulan Januari sampai Juni serta gaji THR dan gaji ke 13.

Realisasi Belanja Pegawai Bawaslu kota Surabaya mengalami kenaikan periode 30 Juni 2023 dibandingkan periode 30 Juni 2022 dikarenakan pembayaran Belanja Pegawai PNS Bawaslu Kota Surabaya pada periode Juni 2023 sudah dibayarkan oleh Sekretariat Bawaslu kota Surabaya sedangkan untuk periode 30 Juni 2022 masih dibayarkan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dalam belanja pegawai periode 30 Juni 2023 terdapat Pengembalian Belanja Pegawai yang berasal dari Potongan Pengajuan Tagihan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Pengembalian Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2023

NO	Uraian	Nomor Invoice	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Akun	Nominal
1	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 untuk 4 Pegawai	00076T/686508/2023	00076T	12 April 2023	511119	90
Jumlah Belanja Kotor						90

Bukti potongan pada pengajuan tagihan sebagaimana penjelasan Pengembalian Belanja Pegawai diatas dapat kami lampirkan pada Lampiran Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023.

Pada Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya periode 30 Juni 2023 terdapat pagu minus pada Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar **Rp. (1.367.200,00)** dengan Anggaran sebesar **Rp. 10.220.000,00** dan Realisasi sebesar **Rp. 11.587.200,00**. Hal itu dikarenakan belum dilakukan Revisi KPA (POK).

B.3. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 9.553.450.253,00** dan **Rp 297.851.697,00**. Belanja Barang adalah belanja atas komponen pendukung kegiatan pada satuan kerja kecuali yang terdapat pada belanja pegawai dan belanja modal. Pada periode 30 Juni 2023 realisasi belanja barang sebesar **Rp 9.553.450.253,00** atau **61%** dari anggaran sebesar **Rp 15.719.181.000,00**.

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	728.445.000	332.495.748	45,64
Belanja Barang Non Operasional	5.806.105.000	4.208.445.253	72,48
Belanja Persediaan	9.000.000	0	0
Belanja Jasa	2.487.544.000	2.142.004.552	86,11
Belanja Pemeliharaan	521.349.000	250.420.700	48,03
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.175.738.000	2.600.464.000	42,11
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0
Jumlah Belanja	15.719.181.000	9.533.830.253	61
Pengembalian Belanja	0	380.000	0
Total Belanja	15.719.181.000	9.533.450.253	61

Realisasi belanja barang Bawaslu Kota Surabaya seluruhnya berasal dari sumber dana Rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya sampai dengan bulan Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Belanja Barang Operasional per 30 Juni 2023

No	Rincian	Jumlah Bruto	Pengembalian	Jumlah Neto
1	Belanja Keperluan Perkantoran	283.489.748	-	283.489.748
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	206.000	-	206.000
3	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48.800.000	-	48.800.000
4	Belanja Barang Operasional Lainnya	-	-	-
Total		332.495.748	-	332.495.748

2. Belanja Barang Non Operasional

Belanja barang non Operasional di Lingkungan Bawaslu Kota Surabaya sampai dengan bulan Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Belanja Barang Non Operasional per 30 Juni 2023

No	Rincian	Jumlah Bruto	Pengembalian	Jumlah Neto
1	Belanja Bahan	543.695.253	-	543.695.253
2	Belanja Honor Output Kegiatan	3.664.750.000	-	3.664.750.000
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	-	0
Total		4.208.445.253	-	4.208.445.253

3. Belanja Barang Persediaan

Belanja barang persediaan di Lingkungan Bawaslu Kota Surabaya sampai dengan bulan Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Belanja Barang Persediaan per 30 Juni 2023

No	Rincian	Jumlah Bruto	Pengembalian	Jumlah Neto
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	-	0
Total		0	-	0

4. Belanja Jasa

Belanja jasa di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya sampai dengan bulan Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Belanja Jasa per 30 Juni 2023

No	Rincian	Jumlah Bruto	Pengembalian	Jumlah Neto
1	Belanja Langganan Listrik	30.342.112	-	42.025.483
2	Belanja Langganan Telpon	-	-	-
3	Belanja Langganan Air	2.912.440	-	2.912.440
4	Belanja Konsultan	-	-	-
5	Belanja Sewa	2.053.850.000	-	2.053.850.000
6	Belanja Jasa Profesi	54.900.000	-	54.900.000
Total		2.142.004.552	-	2.142.004.552

5. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya sampai dengan bulan Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 15. Realisasi Belanja Pemeliharaan per Juni 2023

No	Rincian	Jumlah Bruto	Pengembalian	Jumlah Neto
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	128.600.000	-	128.600.000

2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121.820.700	-	121.820.700
Total		250.420.700	-	250.420.700

6. Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Tabel 16. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 30 Juni 2023

No	Rincian	Jumlah Bruto	Pengembalian	Jumlah Neto
1	Belanja Perjalanan Biasa	-	-	-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.596.524.000	-	1.596.524.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	803.940.000	380.000	555.860.000
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	200.000.000	-	200.000.000
Total		2.600.464.000	380.000	2.600.084.000

Adapun rincian perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	30-Jun-2023	30-Juni-2022	
Belanja Barang Operasional	332.495.748	237.551.735	39,96
Belanja Barang Non Operasional	4.208.445.253	-	-
Belanja Persediaan	-	-	-
Belanja Jasa	2.142.004.552	13.940.647	15.265,17
Belanja Pemeliharaan	250.420.700	13.825.295	1.711,32
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.600.084.000	32.534.020	7.891,89
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Barang Kotor	9.533.830.253	297.851.697	3.100,86
Pengembalian Belanja Barang	380.000		
Jumlah Belanja Barang	9.533.450.253	297.851.697	3.100,07

Realisasi belanja barang sebesar **Rp.9.533.450.253,00** merupakan hasil pengurangan dari realisasi Belanja Barang Kotor sebesar **Rp. 9.533.830.253,00** dikurangi Pengembalian Belanja Barang sebesar **Rp. 380.000,00**. Realisasi Belanja Barang Bawaslu Kota Surabaya mengalami kenaikan periode 30 Juni 2023 dikarenakan sudah memasuki tahapan pemilu yang menyebabkan banyaknya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan periode 30 Juni 2022.

Realisasi belanja barang per 30 Juni 2023 sebesar **Rp. 9.553.450.253,00** seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM) yang dipergunakan untuk pelaksanaan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi dan Program dukungan manajemen. Pengembalian belanja barang Bawaslu Kota Surabaya berupa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114). Rincian Pengembalian Belanja Barang yaitu sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Pengembalian Belanja per 30 Juni 2023

No	Uraian	Tgl Dok	NTPN	NTB	Akun	Nominal
1	Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya	14 April 2023	BEB8145IQMM0OP0S	000000245139	524114	380.000

Bukti pengembalian Belanja Barang tersebut dapat kami lampirkan pada Lampiran I Laporan Keuangan Semester I 2023.

B.4. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.66.728,00** dan **Rp 0,00**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada periode 30 Juni 2023 realisasi belanja Modal sebesar **Rp 66.728.000,00** atau **17 %**

dari anggaran sebesar **Rp 395.550.000,00**. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal periode sampai dengan 30 Juni 2023 sebagaimana berikut ini:

Tabel 19. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Periode s.d. 30 Juni 2023

NO	Rincian	Anggaran	Realisasi	%Real Angg.
1	Belanja Modal	395.550.000	66.728.000	17
JUMLAH BELANJA		395.550.000	66.728.000	17
Pengembalian Belanja		-	-	-
JUMLAH		395.550.000	66.728.000	17

Realisasi Belanja Modal pada Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya yaitu merupakan realisasi **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** sebesar **Rp. 66.728.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Periode s.d. 30 Juni 2023

NO	KODE	NAMA BARANG	UNIT	JUMLAH
1	3050206020	Camera Video	1	18.199.000
2	3050206046	Handy Cam	1	13.129.000
4	3100203003	Printer(Peralatam Personal Komputer)	6	35.400.000
Jumlah Belanja Modal			19	66.728.000

Perbandingan Realisasi Belanja Modal antara 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022:

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode s.d. 30 Juni 2023

NO	Uraian	30-Jun-2023	30-Jun-2022	Naik (Turun) %
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.728.000	-	-
2	Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		66.728.000	0	-
Pengembalian Belanja		-	-	-
Jumlah Belanja Modal		66.728.000	0	-

Realisasi belanja modal periode 30 Juni 2023 Bawaslu Kota Surabaya yaitu berupa belanja modal peralatan dan mesin sebesar **Rp. 66.728.000** sedangkan untuk periode 30 Juni 2022 belum ada realisasi belanja modal

dikarenakan belum adanya kebutuhan untuk belanja modal tersebut pada Bawaslu Kota Surabaya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp 1.244.929.412,00** dan **Rp 0,00**.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 Bulan sejak tanggal pelaporan.

C.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp. 30.000.000,00** dan **Rp. 0,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

KETERANGAN	30-Jun-2023	31-Des-2022
Uang Tunai di Kas Bendahara	30.000.000	-
Uang di Rekening Bendahara	-	-
JUMLAH	30.000.000	-

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp.1.214.929.412,00** dan **Rp. 0,00**. Yang terdiri dari LS Bendahara yang belum terdistribusi sebesar **Rp.8.850.000,00**

dan LS RDP yang belum terdistribusi sebesar **Rp. 1.206.079.412,00**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi Jangka Pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

KETERANGAN	30-Jun-2023	31-Des-2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.214.929.412	-
JUMLAH	1.214.929.412	-

C.4. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp. 90.755.724** dan **Rp. 5.153.600**.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya berupa Peralatan dan Mesin.

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin sekretariat Bawaslu Kota Surabaya sebesar **Rp. 270.803.787,00** dan **Rp. 169.150.507,00**.

Adapun perbandingan peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022:

**Tabel 24. Perbandingan Peralatan dan Mesin
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022**

NO	KODE	NAMA BARANG	30-Jun-23	31-Des-22
1	3050104001	Lemari besi atau Metal	8,598,000	8,598,000
2	3050104002	Lemari Kayu	5,398,000	5,398,000
3	3050104003	Rak Besi	2,266,000	0
4	3050104007	Brandkas	6,370,200	6,370,200
5	3050105015	Alat Penghancur Kertas	3,378,000	3,378,000
6	3050105017	Mesin Absensi	3,250,000	0
7	3050105048	LCD Projector/Infocus	5,000,000	5,000,000
8	3050201002	Meja Kerja Kayu	33,588,000	33,588,000
9	3050201003	Kursi Besi/Metal	15,129,000	9,189,000
10	3050201005	Sice	26,688,000	26,688,000
11	3050201008	Meja Rapat	7,299,000	7,299,000
12	3050204004	A.C. Split	9,599,280	0
13	3050206020	Camera Video	18,199,000	0
14	3050206046	Handy Cam	13,129,000	0
15	3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	2,750,000	2,750,000
16	3100102001	P.C Unit	33,400,674	33,400,674
17	3100102002	Lap Top	13,870,000	0
18	3100102003	Note Book	26,443,158	26,443,158
19	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	35,400,000	0
20	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1,048,475	1,048,475
JUMLAH BELANJA			270,803,787	169.150.507

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Tabel 25. Mutasi Peralatan dan Mesin 30 Juni 2023

Saldo Awal	169.150.507
Mutasi Tambah:	
Pembelian	66.728.000
Transfer Masuk	34.925.000
Mutasi Kurang:	
Saldo per 30 Juni 2023	270.803.787
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(180.048.063)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	90.755.724

Mutasi transaksi tambah **Pembelian** periode 30 Juni 2023 sebesar **Rp. 66.728.000,00** merupakan Pembelian peralatan

fasilitas kantor yang diperuntukan kepada Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) Nomor: BASTP/PPK/5/JI-38/5.13/2023 tanggal 25 Mei 2023; Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) Nomor: BASTP/PPK/5/JI-38/5.12/2023 tanggal 09 Mei 2023; sebagaimana terlampir pada Lampiran II Laporan Keuangan Semester I Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya. Pembelian dari Peralatan dan Mesin 30 Juni 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 26. Mutasi Transaksi Tambah dari Pembelian Peralatan dan Mesin 30 Juni 2023

NO	KODE	NAMA BARANG	UNIT	JUMLAH (Rp.)
1	3050206020	Camera Video	1	18,199,000
2	3050206046	Handy cam	1	13,129,000
3	3100203003	Printer (Peralatan uPersonal Komputer	6	35,400,000
JUMLAH BELANJA				66,728,000

Mutasi transaksi tambah **Transfer Masuk** peralatan dan mesin periode 30 Juni 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 27. Mutasi Transaksi Tambah dari Transfer Masuk Peralatan dan Mesin 30 Juni 2023

NO	KODE	NAMA BARANG	UNIT	JUMLAH (Rp.)
1	3050104003	Rak Besi	2	2,266,000
2	3050105017	Mesin Absensi	1	3,250,000
3	3050201003	kursi Besi/Metal	4	5,940,000
4	3050204004	A.C. Split	2	9,599,280
5	3100102002	Lap Top	2	13,870,000
JUMLAH BELANJA				34,925,280

Mutasi transaksi tambah **Transfer Masuk** Peralatan dan Mesin periode 31 Desember sebesar **Rp. 34.925.280,00** sesuai dengan Berita Acara Transfer Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Nomor 344/PL.09/JI/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana

terlampir pada Lampiran II Laporan Keuangan Tahunan Sekeretariat Bawaslu Kota Surabaya.

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Perbandingan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 180.048.063,00** dan **Rp 163.996.907,00**.

Tabel 28. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021

NO	Uraian	30-Jun-2023	31-Des-2021
1	Peralatan dan Mesin	(180.048.063)	(163.996.907)
	Jumlah	(180.048.063)	(163.996.907)

Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 30 Juni 2023:

Tabel 29. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2023

KODE ASET	NAMA BARANG	QTY	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
3050104001	Lemari Besi/Metal	2	8.598.000	(8.598.000)	-
3050104002	Lemari Kayu	2	5.398.000	(2.159.200)	3.238.800
3050104003	Rak Besi	2	2.266.000	(453.200)	1.812.800
3050104007	Brandkas	1	6.370.200	(6.370.200)	-
3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	3.378.000	(3.378.000)	-
3050105017	Mesin Absensi	1	3,250,000	(650,000)	2.600.000
3050105048	LCD Projector/Infocus	1	5.000.000	(5.000.000)	-
3050201002	Meja Kerja Kayu	12	33.588.000	(33.588.000)	-
3050201003	Kursi Besi/Metal	11	15.129000	(10.377.000)	4.752.000
3050201005	Sice	3	26.688.000	(26.688.000)	-

3050201008	Meja Rapat	1	7.299.000	(7.299.000)	-
3070101999	A.C. Split	1	9.599.280	(1.919.856)	7.679.424
3050206020	Camera Video	1	18.199.000	(1.819.900)	16.379.100
3050206046	Handy Cam	1	13.129.000	(1.312.900)	11.816.100
3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	1	2.750.000	(1.650.000)	1.100.000
3100102001	P.C. Unit	6	33.400.674	(33.400.674)	-
3100102002	Lap Top	2	13.870.000	(3.467.500)	10.402.500
3100102003	Note Book	6	26.443.158	(26.443.158)	-
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	35,400,000	(4,425,000)	30.975.000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1.048.475	(1.048.475)	
JUMLAH		68	270.803.787	(180.048.063)	90.755.724

C.7. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 adalah Rp **0,00** dan Rp **0,00**.

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan sebagai aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung, dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan.

C.8. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada Bawaslu Kota Surabaya adalah Aset Tetap Lainnya yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan. Saldo Aset Lain-lain Bawaslu Kota Surabaya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.**4.559.000,00** dan **4.559.000,00**

Adapun Perbandingan Aset Tetap Lainnya yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Perbandingan Aset Lain-Lain
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

NO	KODE	NAMA BARANG	30-Jun-23	31-Des-22
1	3100102003	Note Book	4.599.000	4.599.000
JUMLAH BELANJA			4.599.000	4.599.000

Mutasi nilai Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Tabel 31. Mutasi Aset Lain-Lain 30 Juni 2023

Saldo Awal	-
Mutasi Tambah:	
Transfer Masuk (Henti Guna)	4.599.000
Mutasi Kurang:	
Saldo per 30 Juni 2023	4.599.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(4.599.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	0

Rincian saldo Transfer Masuk Aset Lain-lain periode 30 Juni 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 32. Rincian Saldo Transfer Masuk Aset Lain-lain 30 Juni 2023

NO	KODE	NAMA BARANG	UNIT	JUMLAH (Rp.)
1	3100102003	Note Book	1	4.559.000
JUMLAH BELANJA				4.559.000

Rincian saldo Transfer Masuk Aset Lain-lain periode 30 Juni 2023 sebesar **Rp. 4.559.000,00** sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) Nomor: 223/PL.01JI/07/2022 Tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana terlampir pada Lampiran II Laporan Keuangan Semester I Bawaslu Kota Surabaya.

C.9. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp (4.559.000,00)** dan **Rp. (4.559.000,00)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Perbandingan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31

Desember 2022 adalah masing-masing sebesar minus **Rp 4.559.000,00** dan **Rp Rp 4.559.000,00**

Tabel 33. Perbandingan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021

NO	Uraian	30-Jun-2023	31-Des-2021
1	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(4.559.000)	-
Jumlah		(4.559.000)	(4.559.000)

Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Lainnya per 30 Juni 2023:

Tabel 34. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 30 Juni 2023

NO	NAMA BARANG	QTY	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Note Book	1	4.559.000	(4.559.000)	-
JUMLAH		1	4.559.000	(4.559.000)	0

C.10. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban .utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah **Rp. 1.345.732.724,00** dan **Rp. 0,00**.

C.11. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp. 1.315.732.724,00** dan **Rp. 0,00**. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus

segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun perbandingan rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

NO	Uraian	30-Juni-2023	31-Des-2022
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	79.803.312	-
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	29.850.000	-
3	Sisa LS pada Rekening Dana Pemilu	1.206.079.412	-
JUMLAH		1.315.732.724	-

Utang kepada pihak ketiga periode 30 Juni 2023 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Nilai belanja pegawai yang masih harus dibayar periode 30 Juni 2023 adalah Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAKTI berdasarkan belanja yang telah terbentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) namun belum diterbitkan SP2D oleh KPPN pada saat periode Pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Belanja Pegawai yang masih harus dibayar per 30 Juni 2023

NO	Uraian	NO SPP	NOMINAL
1	Gaji Induk PNS Bulan Juli 2023	00122T	26.598.312
2	Uang Kehormatan Pejabat Negara Bulan Juli 2023	00127T	53.205.000
JUMLAH			79.803.312

Hal tersebut diatas akan terselesaikan apabila telah diterbitkan SP2D oleh KPPN, sebagaimana terlampir pada **Lampiran II** Laporan Keuangan Semester I Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Nilai belanja barang yang masih harus dibayar periode 30 Juni 2023 adalah Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAKTI berdasarkan belanja yang telah terbentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) namun belum diterbitkan SP2D oleh KPPN pada saat periode Pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Belanja Barang yang masih harus dibayar per 30 Juni 2023

NO	Uraian	NO SPP	NOMINAL
1	Gaji PPNPN Bulan Juni 2023	00128T	21.000.000
2	LS Perjalanan Dinas	00131T	8.850.000
JUMLAH			29.850.000

Hal tersebut diatas akan terselesaikan apabila telah diterbitkan SP2D oleh KPPN, sebagaimana terlampir pada **Lampiran II** Laporan Keuangan Semester I Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya. Sedangkan untuk perjalanan dinas akan terselesaikan apabila bendahara telah mendistribusikan dana perjalanan dinas tersebut kepada masing-masing penerima.

3. Sisa LS pada Rekening Dana Pemilu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.05/2022 Pasal 27 ayat 1 bahwa Penyaluran Dana untuk anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu kepada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dalam negeri dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran LS ke Rekening Dana Pemilu yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kota Surabaya terdapat sisa Anggaran pada Rekening Dana Pemilu yang dikelola, sebagaimana

terlampir pada **Lampiran II** Laporan Keuangan Semester I Bawaslu Kota Surabaya.

C.12. Uang Muka Dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp 30.000.000,00** dan **Rp 0**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Tabel 38. Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023

NO	Uraian	NO SPP	NOMINAL
1	Tambahan Uang Persediaan	00003T	30.000.000
JUMLAH			30.000.000

Dokumen pemberian uang mua dari KPPN terlampir pada Lampiran II Laporan Keuangan Semester I Bawaslu Kota Surabaya.

C.13. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp (10.047.588,00)** dan **Rp 5.153.600,00** Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar **Rp 1.335.685.136,00** dan kewajiban sebesar **Rp 1.345.732.724,00**. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 847.320.263,00** dan **Rp 440.733.900,00**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. . Perbandingan Beban pegawai pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Perbandingan Beban Pegawai
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

	Uraian	30-Juni-2023	30-Juni-2022	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	182.170.528	-	-
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.777	-	-
3.	Beban Tunj.Suami/Istri PNS	13.754.058	-	-
4	Beban Tunj. Anak PNS	4.367.700	-	-
5	Beban Tunj. Struktural PNS	13.320.000	-	-
6	Beban Tunjangan Beras PNS	13.035.600	-	-
7	Beban Uang Makan PNS	26.159.000	4.440.000	489,16
8	Beban Tunjangan Umum PNS	6.660.000	-	-
9	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	472.190.700	436.293.900	8,22
10	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	115.749.900	-	-
	Jumlah Belanja	847.320.263	440.693.900	92,56

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional per 30 Juni 2023, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 40. Mutasi Beban Pegawai per 30 Juni 2023

Mutasi Tambah	30 Juni 2023
Belanja Pegawai (LRA)	767.516.951
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	79.803.312
Jumlah Mutasi Tambah	847.320.263
Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2023	847.320.263

D.2. Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 6.703.945.553** dan **Rp 292.492.382,00**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perbandingan Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

NO	Uraian	30-Jun-2023	30-Jun-2022	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	304.489.748	218.701.735	39,22
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	206.000	-	-
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48.800.000	17.050.000	186,21
4	Beban Barang Operasional Pandemi Covid -19	-	1.800.000	-
4	Beban Bahan	543.695.253	-	-
5	Beban Honor Output Kegiatan	3.664.750.000	-	-
6	Beban Langganan Listrik	30.342.112	13.940.647	117,65
7	Beban Langganan Air	2.912.440	-	-

8	Belanja Sewa	2.053.850.000	-	-
9	Belanja Jasa Profesi	54.900.000	-	-
Jumlah		6.703.945.553	292.492.382	2.192,0

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional per 30 Juni 2023, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 42. Mutasi Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023

Mutasi Tambah	30 Juni 2023
Belanja Barang Operasional (LRA)	332.495.748
Belanja Barang Non Operasional (LRA)	4.208.445.253
Belanja Jasa (LRA)	2.142.004.552
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	21.000.000
Jumlah Mutasi Tambah	6.703.945.553
Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023	6.703.945.553

D.3. Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 250.420.700** dan **Rp 292.492.382,00**.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perbandingan Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 43. Perbandingan Beban Pemeliharaan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

NO	Uraian	30-Jun-2022	30-Jun-2023	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	128.600.000	9.290.295	1.284,22
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121.820.700	4.535.000	2.586,23

Jumlah	250.420.700	13.825.295	1.711,3
--------	-------------	------------	---------

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 2.600.084.000,00** dan **Rp 32.534.020,00**.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.. Adapun perbandingan Beban Perjalan Dinas pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

NO	Uraian	30-Jun-2023	30-Jun-2022	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	-	11.510.000	-
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.596.524.000	310.000	49,68
2	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	803.560.000	-	-
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	200.000.000	20.714.020	(865,52)
	Jumlah	2.600.084.000	32.534.020	7.891,8

D.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 12.211.878,00** dan **Rp. 0,00**. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Perbandingan beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	30-Juni-2023	30-Jun-2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.211.878	-	-
Jumlah Penyusutan	12.211.878	-	-

Jumlah Amortisasi	-	-	-
JUMLAH	12.211.878	-	-

D.6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

E. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 5.153.000,00** dan **Rp 0,00**.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 defisidan 30 Juni 2022 adalah defisit sebesar **Rp (10.413.982.394)** dan Surplus **Rp. 779.585.597** . Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Sedangkan Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 10.398.781.206,00** dan **Rp 686.174.997,00**. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 46. Rincian Transaksi Antar Entitas 30 Juni 2022

URAIAN	30-Jun-2023	30-Jun-2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.367.695.204	-
Transfer Masuk	31.086.002	-
JUMLAH	10.398.781.206	-

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DKEL sebesar **Rp. 10.367.695.204,00**. Rincian DKEL sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 47. Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain
30 Juni 2023**

URAIAN	30-Jun-23
Belanja Pegawai	767.516.951
Belanja Barang	9.533.450.253
Belanja Modal	66.728.000
JUMLAH	10.367.695.204

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset / kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K / L, antar K / L, dan antara K / L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar **Rp. 31.086.002,00** yang merupakan transfer **Peralatan dan Mesin** dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur

E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp (10.047.588,00)** dan **Rp (121.410.600)**.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pengungkapan Pengembangan Struktur Organisasi

Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya terbentuk menjadi Unit Kerja Mandiri (UKM) dimulai pada akhir tahun 2021. Hal tersebut berdasarkan dari Surat Sekjen Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 3678/PR.01.01/SJ/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal penyampaian Satuan Kerja Baru di 18 Kabupaten/Kota. Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Plt. Kepala Sekretariat Kota Surabaya a.n **Arif Priyono, S.E** pada Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya sesuai Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 527/KP.05.00/SJ/03/2023, tanggal 13 Maret 2023.
- b. Pengangkatan Kepala Subbagian Administrasi Kota Surabaya a.n **Tangguh Gradhianta, S.Si** pada Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 3215/KP.04.00/SJ/12/2021, tanggal 24 Desember 2021;
- c. Pengangkatan Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat a.n **Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S.IP** Kota Surabaya a.n pada Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya sesuai Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Nomor 0405/KP.04.00/SJ/05/2022, tanggal 12 Mei 2022; dan
- d. Pengangkatan Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Kota Surabaya a.n **Aria Pratomi Adi Saputra, S.H** pada Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0405/KP.04.00/SJ/05/2022, tanggal 12 Mei 2022

F.2. Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 120/KU.01.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Keputusan terkait Penunjukkan Pejabat Perbendaharaan yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 001/KU.01.00/JI-38/01/2023 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 002/KU.01.00/JI-38/01/2023 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023; dan
3. Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 03/KU.01.00/JI/01/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022.
4. Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 011/PL.03.JI-38/03/2023 Tentang

Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.

5. Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 007/KU/01.00/JI-38/01/2023 Tentang Penunjukan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.

Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Arif Priyono, S.E.
 Pejabat Pembuat Komitmen : Tangguh Gradhianta, S.E.
 Pejabat Penandatanganan SPM : Dita Mustika Ramadhani, S.AP.
 Bendahara Pengeluaran : Wenny Novi Astuti, S.H.
 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa : Anditya Sentana, S.Si., M.M.

F.3. Pengungkapan Lain-lain

1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional APBN di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebanyak 2 rekening, yaitu:

NO	JENISREKENING	NAMA REKENING	NO REKENING	NAMA BANK
1	Bendahara Pengeluaran	BPG 031 BAWASLU KOTA SURABAYA	9890716865081000	BNI
2	Rekening Lainnya	RPL 031 PS BAWASLU	58401001780308	BRI

		KOTA SURABAYA		
--	--	------------------	--	--

2. Pengendalian Inytern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Bawaslu telah mengimplementasikan PIPK tersebut dengan telah menentukan akun signifikan yaitu:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran;
2. Peralatan dan Mesin; dan
3. Tanah

Selanjutnya, Bawaslu telah membuat pedoman Penerapan PIPK sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0363/Bawaslu/SJ/HK.01.00/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Pedoman Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Link Dokumen PIPK:

https://drive.google.com/drive/folders/1laDMBIVzk_cLBMp0ITRsWgtoMZqxjgeA?usp=sharing

LAMPIRAN